

Analisa Kebijakan Pemerintah di Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Inflasi antara Tahun 2018 - 2020

Raihan¹, Sahat Juliwan Tarihoran², Kevin Jonay Lie³, Tesalonika Sembiring⁴, Jhohari⁵

e-mail : 2141022.raihan@uib.edu¹, 2141337.sahat@uib.edu², 141180.kevin@uib.edu³,
2141011.tesalonika@uib.edu⁴, 2141084.jhohari@uib.edu⁵

Universitas Internasional Batam

Alamat: Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426

Korespondensi penulis: 2141022.raihan@uib.edu

Abstract

Inflation is closely related to unemployment and the economic performance of a country. The relationship between the inflation rate and unemployment affects decisions to be taken in financial policy. The purpose of this article is to analyze government policies in Batam City regarding the threat of unemployment in inflation in 2018-2020. The method we use is library research. From the results of our analysis, we find that the highest unemployment rate is in 2020 at 11.79%. And the movement of inflation has increased and decreased. We also analyze the policies that can be taken by the Batam city government in overcoming this problem.

Keywords: *Unemployment, Inflation, Batam, Government Policy*

Abstrak

Inflasi sangat erat kaitannya dengan pengangguran dan kinerja perekonomian suatu negara. Hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam kebijakan keuangan. Tujuan artikel ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah di Kota Batam terkait ancaman pengangguran pada inflasi tahun 2018-2020. Metode yang kami gunakan adalah penelitian kepustakaan. Dari hasil analisis kami, kami menemukan bahwa tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 sebesar 11,79%. Dan pergerakan inflasi mengalami peningkatan dan penurunan. Kami juga menganalisis kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah kota Batam dalam mengatasi masalah ini.

Kata Kunci : Pengangguran, Inflasi, Batam, Kebijakan Pemerintah

Pendahuluan

Inflasi berkaitan erat dengan yang namanya pengangguran dan kinerja ekonomi suatu Negara. Hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran itu mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam kebijakan finansial.

Tingkat pengangguran Indonesia juga sangat tinggi dikarenakan populasi penduduk yang sangat

Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; Accepted Desember 30, 2022

* Raihan, 2141022.raihan@uib.edu

tinggi, pada saat ini Indonesia menempati posisi keempat dalam skala dunia. Oleh karena itu pemerintah harus dapat mengatasi masalah ini dengan cara yang baik dan benar agar tingkat pengangguran dapat berkurang. Inflasi merupakan suatu kejadian dimana suatu Negara mengalami kenaikan dalam tingkat ekonomi sedangkan pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, penyebab dari banyaknya pengangguran di Indonesia dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Pengangguran tidak hanya dihadapi oleh Negara berkembang, pada Negara maju juga ada pengangguran.

Pengangguran di Indonesia sudah mencapai angka puluhan juta orang yang dimana hal tersebut menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Dikarenakan pengangguran memiliki dampak yang sangat berbahaya, terdapat kejahatan sosial seperti pencopetan, pencurian, penjam-bretan, perampokan, penculikan anak, jual beli anak dan lain-lain itu merupakan dampak dari pengangguran (Atmadja 2004). Kami menggunakan suatu kota yang ada di provinsi kepulauan Riau yaitu Kota Batam sebagai objek penelitian kami. Kami menggunakan data yang kami dapat di Badan Pusat Statistika Kota Batam, disini kami menggunakan data dari tahun 2018 hingga 2020. Kami membuat penelitian ini adalah agar kami dapat menganalisis kebijakan apa yang pemerintah ambil untuk menjawab ancaman kenaikan inflasi yang akan berdampak pada pengangguran yang terjadi di Kota Batam dalam kurun waktu mulai dari tahun 2018 hingga 2020.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi, ekonomi makro yaitu suatu pembelajaran yang dimana seseorang mempelajari kebijakan ekonomi dalam skala yang besar. Seperti: Pendapatan Nasional, Produksi Nasional, dan Investasi Nasional. Singkatnya ekonomi makro itu berfokus pada interaksi sesama tenaga kerja dan pergerakan barang. Situasi makro ekonomi dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Permasalahan dalam ekonomi makro berkaitan dengan tingkat pendapatan.

- 1) Masalah Jangka Pendek
 1. Inflasi
 2. Pengangguran
 3. Ketimpangan dalam Neraca

- 2) Masalah Jangka Panjang
 1. Pertumbuhan Penduduk Tinggi.
 2. Peningkatan Kapasitas Produksi

2. Inflasi

Inflasi merupakan suatu kenaikan harga dalam barang maupun jasa dalam jangka waktu yang tertentu. Berdasarkan *COICOP* inflasi dikelompokkan didalam tujuh pengeluaran, yaitu : Bahan

Analisa Kebijakan Pemerintah di Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Inflasi antara Tahun 2018 - 2020

Makan, Makanan Jadi, Rumah, Sandang, Pendidikan, Kesehatan, Komunikasi. Di Indonesia disagregasi inflasi dikelompokkan menjadi dua menurut BPS, yaitu :

1. Inflasi Inti : Suatu komponen yang menentang didalam pergerakan inflasi.
2. Inflasi Non Inti : Suatu komponen yang volatilitasnya tinggi.

Terdapat faktor yang dinyatakan dalam buku “Kebanksentralan” seri inflasi (Suseno dan Siti Astiyah, 2009:11-17) yaitu:

1. Inflasi oleh faktor permintaan (*Demand Pull Inflation*)
Terjadinya inflasi karena permintaan disebabkan oleh kenaikan jangka pendek dalam jumlah uang beredar.
2. Inflasi Sisi Penawaran (*Cost push inflation/ supply shock inflation*)
Inflasi penawaran adalah inflasi yang menyebabkan naiknya harga komoditas yang dikendalikan pemerintah seperti komoditas yang harus diimpor
3. Inflasi Campuran (*Mixed Inflation*)
Inflasi campuran ialah gabungan dari 2 jenis inflasi diatas yaitu dari faktor permintaan dan faktor penawaran
4. Inflasi Ekspektasi (*Expected Inflation*)
Inflasi bukan hanya didorong oleh faktor penawaran dan permintaan, tetapi juga didorong oleh ekspektasi agen, terkadang disebut sebagai ekspektasi inflasi.

3. Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. Menurut (BPS) pengertian pengangguran penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau dapat didefinisikan juga sebagai penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan karena sudah mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Pengukuran tingkat pengangguran suatu wilayah atau regional dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)
Tingkat pengangguran dapat dihitung sebagai persentase dengan menghubungkan jumlah orang yang menganggur dengan jumlah total orang yang bekerja.
- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
 - 1) Pegawai tetap (*employed*) adalah seseorang yang bekerja penuh waktu atau yang minggu kerjanya mencapai 35 jam.
 - 2) Setengah Pengangguran adalah seseorang yang bekerja tetapi kurang dimanfaatkan atau bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini kami menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi. Kami juga mengenal lebih dalam mengenai penyebab terjadinya inflasi. Sumber data yang kami gunakan untuk menyelesaikan artikel ini adalah sumberdata sekunder, yang dimana data ini merupakan data yang telah diambil atau telah ada pada objek penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data yang kami gunakan bersumber dari dokumen dokumen organisasi tersebut yang kami anggap berkaitan dengan pembahasan kami. Penulis juga mendapatkan data dari BPS Kota Batam, Jurnal, dan *Website*. Selanjutnya terdapat metode pengumpulan data yang dilakukandalam mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitiankepuustakaan (*library research*). Penelitian kepuustakaan adalahpenelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupunlaporan hasil penelitian terdahulu.

Dalam tahap ini, penulis juga menggabungkan semua data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang terkumpul yaitu inflasi dan jumlah pengangguran di kota Batam dari tahun 2018-2020. Dari data dan permasalahan yang kami telah kumpulkan, “Kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi”. Tingkat inflasilumayan rendah di berbagai permasalahan yang dihadapi. Tahap ini penulis akan menganalisa dan mendeskripsikan lebih rinci serta detail data yang telah dikumpulkan dari jurnal dan media.Berdasarkan data yang sudah didapatkan oleh penulis, dibuatlah tabel rincian yang berisi jumlah penduduk, persentase pengangguran, jumlah pengangguran dan tingkat inflasi diKota Batam.Hasil dan Pembahasan

Dari tabel di bawah menunjukkan persentase tingkat pengangguran di Kota Batam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk tahun 2021 penulis telah mencari di website sensus penduduk dan beberapa pencarian lainnya tetapi tidak menemukan data khusus tahun 2021 sehingga kami hanyamenganalisa tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terakhir.

Tabel 1. Tingkat pengangguran di Kota Batam

Wilayah Batam	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2018	2019	2020
Kota Batam	10.07	8.31	11.79

Sumber: BPS, 2021

*Analisa Kebijakan Pemerintah di Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran
Pasca Inflasi antara Tahun 2018 - 2020*

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pengangguran terbuka pada tahun 2018 pengangguran di kota batam itu lumayan tinggi yaitu 10,07% nilai ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun ini tingkat pengangguran di kota batam hanya sebesar 8,31% .Nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini pengangguran di kota batam hanyasedikit. Tetapi pada tahun 2020 terjadi pelonjakan dalam persentase pengangguran pada tahun 2020 tingkat pengangguran sebesar 11.79% nilai ini sangat tinggi apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Jadi dari data ini kita mengetahui dari tahun 2018 hingga 2020 pengangguran paling banyak di kota batam itu pada tahun 2020 dan tingkat pengangguran yang paling sedikit itu pada tahun 2019.

Tabel 2. Tingkat Inflasi di Kota Batam

Bulan	Inflasi Bulanan		
	2020	2019	2018
Januari	0.16	0.08	0.99
Februari	-0.15	0.26	-0.06
Maret	-0.39	-0.01	0.27
April	0.07	0.18	-0.32
Mei	0.16	1.03	0.1
Juni	0.06	0.24	1.29
Juli	-0.17	0.61	0.24
Agustus	0.02	-0.86	-0.66
September	-0.12	-0.55	-0.09
Oktober	0.13	-0.27	0.13
November	0.32	-0.01	0.51
Desember	1.05	1.28	1.2

Sumber: BPS, 2021

Dari tabel ini merupakan ringkasan inflasi yang terjadi di kota batam dalam kurun waktu 2018 hingga 2020. Data ini disajikan dalam jangka waktu setiap bulannya, pada bulan januari inflasi yang paling tinggi dalam kurun waktu 2018 sampai 2020 adalah pada bulan 2018 yaitu sebanyak 0.99, sedangkan yang paling sedikit ditahun 2019 dengan 0.08 pada bulan selanjutnya yaitu bulan februari yang plg banyak adalah ditahun 2019 dengan nilai 0,26. Di bulan maret dilihat bahwa yang inflasi nya paling tinggi itu ditahun 2018 dengan tingkat inflasi 0,27. Ditahun 2019 di bulan april inflasi lumayan tinggi yaitu sebesar 0,18, pada bulan mei inflasi tertinggi dimiliki pada tahun 2020 sebesar 0,16, bulan juni inflasi tertinggi ditahun 2018 di bulan juli pada tahun 2019 inflasi juga tinggi. Pada bulan agustus yang paling tinggi itu ditahun 2020 sedangkan

di September menurut kami inflasi nya sangat bagus karena tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah dari kurun waktu ini. Oktober 2020 inflasi mulai naik lagi, inflasi naik di bulan November 2018 sebesar 0.52, dan di bulan terakhir yaitu Desember inflasi tertinggi itu pada tahun 2019. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa inflasi dari tahun 2018 hingga 2020 itu tidak signifikan, ada naik dan ada juga turun. Tapi apabila terjadi penurunan maka itu akan berdampak buruk, biasa kita sebut ini dengan deflasi. Deflasi ialah suatu kondisi penurunan harga barang atau jasa pada suatu waktu tertentu. Deflasi ini menyebabkan pengangguran di kota Batam bertambah. Harga barang dan jasa yang menurun menyebabkan perusahaan-perusahaan rugi atau penurunan omset sehingga demi mempertahankan operasionalnya, banyak perusahaan yang melakukan tindakan membatasi tenaga kerja dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada tenaga kerja yang dianggap berlebihan atau tidak perlu. Sedangkan inflasi akan mengurangi suatu pendapatan riil suatu orang dengan pendapatan tetap mereka. Inflasi ini harus segera diatasi maka dari itu disini pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mencegah cara yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan pemerintah, yaitu :

1. Kebijakan Fiskal

Suatu kebijakan yang dimiliki pemerintah yang secara tidak langsung sangat berhubungan dengan pemasukan serta pengeluaran anggaran Negara.

Ada juga tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama adalah untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian Negara, meningkatkan kualitas SDM, Menjaga Stabilitas Harga, mendorong investasi.

Ada juga contoh dari kebijakan fiskal, kemungkinan dari contoh-contoh berikut akan ada yang cocok untuk digunakan pemerintah kotabata dalam mencegah inflasi.

a. Tax Amnesty

Seperti, pembebasan pajak berupa suatu pengurangan dalam kurun waktu yang tertentu bagi seluruh masyarakat yang dimana mereka ingin melaporkan kekayaan mereka.

b. Subsidi BBM dan Gas

Seperti, mengurangi bahan bakar dengan suatu tujuan yaitu agar dapat memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat.

c. Penetapan Harga Enceran Tertinggi (HET)

Analisa Kebijakan Pemerintah di Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Inflasi antara Tahun 2018 - 2020

Seperti, menetapkan harga jual maksimum untuk barang-barang tertentu atau bisa disebut dengan HET.

Menurut analisis kami dari 3 kebijakan yang ada didalam kebijakan fiskal, yang paling cocok untuk kondisi di kota Batam adalah HET atau Penetapan Harga Eceran Tertinggi.

2. Kebijakan Moneter

Salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal asalkan memiliki kaitan dengan jumlah peredaran uang dimasyarakat.

Ada juga beberapa tujuan dari kebijakan moneter yaitu : menjamin stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, melindungi stabilitas harga barang di pasar, menjaga keseimbangan NPI, mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ada juga contoh dari kebijakan moneter, kemungkinan dari contoh-contoh berikut akan ada yang cocok untuk digunakan pemerintah Kota Batam dalam mencegah inflasi.

a. Pelaksanaan Kredit Langsung oleh BI

Hal ini merupakan BI atau Bank Indonesia membuat sistem kredit langsung kepada beberapa sector yang dimana mereka memerlukan dana tambahan secara mendesak atau tiba-tiba.

b. Penyediaan Fasilitas *Overdraft*

Hal ini merupakan suatu bantuan dimana seseorang bisa meminjam uang secara jangka pendek tetapi dengan suku bunga yang tinggi. Tujuannya agar peredaran uang dapat di control dengan baik

c. Penerbitan Surat Utang Negara

Hal ini merupakan pemerintah berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat agar peredaran uang dimasyarakat menurun.

d. Program Intervensi Rupiah

Hal ini merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI dimana merupakan proses pinjam dan meminjam dana secara langsung dalam Pasar Uang Antar Bank

dalam periode tertentu.

Menurut analisis kami dari 4 kebijakan yang ada didalam kebijakan moneter, yang paling cocok untuk kondisi di kota batam adalah Penyediaan Fasilitas *Overdraft*.

3. Kebijakan Non Fiskal dan NonMoneter

Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Ada juga contoh dari kebijakan non fiskal dan non moneter, kemungkinan dari contoh contoh berikut akan ada yang cocok untuk digunakan pemerintah kotabatam dalam mencegah inflasi.

a. Meningkatkan hasil produksi.

Hal ini merupakan suatu cara dimana hasil produksiditingkatkan dengan tujuan agar perputaran uang akan lebih cepat dan lebih banyak, sehingga jumlahperedaran uang seimbang.

b. Meningkatkan masuknya barang impor

Hal ini merupakan suatu cara dalam memenuhi kebutuhandalam negeri dengan cara mendatangkan barang dari luarnegeri.

c. Menjaga kestabilan penghasilan masyarakat.

Hal ini merupakan suatu kebijakanagar pendapatan setiap orang iru memliki rata rata yang sama dengan ini maka dapat mencegah pertumbuhan pendapatan daninflasi.

Menurut analisis kami dari 3 kebijakan yang ada didalam kebijakan non fiskal dan non moneter, yang palingcocok untuk kondisi di kota batam adalah Meningkatkan masuknya barang impor.

*Analisa Kebijakan Pemerintah di Kota Batam Terkait Ancaman Pengangguran
Pasca Inflasi antara Tahun 2018 - 2020*

Kesimpulan

Kenaikkan tingkat harga barang dan jasa secara menyeluruh dan terjadi terus-menerus yang disebut sebagai inflasi berpengaruh besar dengan perekonomian dan keberlangsungan negara. Peneliti melakukan analisis inflasi dan pengangguran di kota Batam dalam kurun waktu 2018 sampai 2020, disini kami menemukan bahwa tingkat pengangguran paling tinggi itu terletak pada tahun 2020 sebesar 11,79% dan untuk tingkat inflasinya ada tahun dimana mengalami kenaikan atau disebut inflasi dan ada juga masa dimana mengalami penurunan atau deflasi. Disini kami juga menganalisis kebijakan pemerintah yang cocok dengan kondisi kota Batam.

Daftar Pustaka

Mardiatillah, R., Panorama, M., & Maftukhatu Solikhah, M. (2021). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8825>

Halim, M. A. (2018). Teori Ekonomi Makro Edisi 3. In *Jakarta. Mitra Wacana Media*.

Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4). <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>